

Analisis Faktor yang Mendorong Implementasi Program SPP Gratis di TK Ar-Raudhah

Syakila Mahira^{1*}, Rizka Amalia²,
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia^(1,2)

Corresponding Author(*)
syakilas748@gmail.com



Article received: 24-06-2025, accepted: 14-08-2025, published: 14-08-2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis faktor keberhasilan implementasi program Sumbangan pembinaan Pendidikan (SPP) gratis di TK Ar-Raudhah, Gampong Pusong Baru, Lhokseumawe, yang telah berjalan sejak tahun 2019. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mewawancarai kepala sekolah, guru, operator sekolah, dan orang tua siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program tersebut didorong oleh tiga faktor utama: (1) tingginya kebutuhan akan akses pendidikan terjangkau di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar berprofesi nelayan; (2) adanya dukungan pendanaan yang signifikan dari Anggaran Dana Gampong (ADG) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP); dan (3) komitmen kuat dari berbagai pemangku kepentingan. Meskipun program ini efektif, penelitian menyarankan perluasan cakupan bantuan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan akses pendidikan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di daerah dengan keragaman ekonomi.

Kata Kunci: *Implementasi, SPP Gratis, Pendidikan Anak Usia Dini, Ekonomi Keluarga.*

Abstract

This study analyzes the success factors of the implementation of the contribution to educational development free (SPP) program at TK Ar-Raudhah, Gampong Pusong Baru, Lhokseumawe, which has been running since 2019. Using a descriptive qualitative approach, this study interviewed the principal, teachers, school operators, and parents of students. The results of the study indicate that the success of the program was driven by three main factors: (1) the high need for access to affordable education amidst the economic conditions of the community, most of whom work as fishermen; (2) significant funding support from the Village Fund Budget (ADG) and Education Operational Assistance (BOP); and (3) strong commitment from various stakeholders. Although the program is effective, the study suggests expanding the scope of assistance and ongoing evaluation to ensure the sustainability and equity of access to education. These findings provide important implications for the development of inclusive education policies in areas with economic diversity.

Keywords: *Implementation, Free SPP, Early Childhood Education, Family Economy.*

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter yang dimulai dari usia dini, diharapkan mampu membentuk para generasi penerus bangsa yang memiliki karakter yang kuat yang mana karakternya tersebut mencerminkan karakter dari bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu mengingat penanaman karakter di usia dini merupakan masa persiapan untuk sekolah pada tingkatan selanjutnya maka penanaman karakter baik pada usia dini merupakan hal yang sangat penting dilakukan,

Hadisi, L. (2015). Pemberian rangsangan yang tepat pada anak akan mampu membentuk sosok pribadi yang baik secara intelektual dan moral. Usia dini merupakan masa emas (the golden age) bagi perkembangan anak. Pada usia tersebut segenap aspek perkembangan anak termasuk kecerdasan sedang pesat terjadi. Banyak ahli menyatakan bahwa perilaku orang dewasa sangat dipengaruhi masa kecilnya, Ruhyana, N. F. (2018). anak yang mendapatkan pembinaan sejak usia dini akan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar, etos kerja, dan produktivitas. Pada akhirnya, anak akan lebih mampu untuk mandiri dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, Menurut Rahman (2005).

Akses terhadap Pendidikan PAUD yang berkualitas tinggi menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi anak. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang menghambat akses anak, terutama anak dengan rentan ekonomi keluarga yang rendah, untuk mendapatkan Pendidikan PAUD yang memadai. Salah satu kendala utama adalah biaya pendidikan, termasuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) merupakan kontribusi dari orang tua untuk membantu pembiayaan operasional sekolah, namun spp ini dapat menjadi beban berat bagi keluarga yg ekonominya kurang mampu. Tingginya biaya SPP dapat menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah atau bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan TK sama sekali. Pada umumnya anak yang berasal dari keluarga menengah keatas lebih banyak mendapatkan pengarah dan bimbingan yang baik dari orang tua mereka. Anak-anak yang berlatar belakang ekonomi rendah, kurang mendapat bimbingan dan pengarah yang cukup dari orang tua mereka, karena orang tua lebih memusatkan perhatiannya pada bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Ayu Permata Sari 2023).

Teori Liberal Klasik, setiap orang dilahirkan dengan jumlah kapasitas tertentu yang sebagian besar diwariskan dan tidak dapat diubah secara substansial. Dengan demikian, sistem pendidikan harus dirancang sedemikian rupa untuk menghilangkan hambatan apa pun termasuk faktor alamiah/takdir anak-anak yang melekat pada dirinya (latar belakang ekonomi orang tua, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, dan geografis/ keadaan lingkungan) yang dapat menghambatnya memperoleh pendidikan, Pedana (2015).

Oleh karena itu, Program SPP gratis menjadi sangat penting, terutama di lingkungan yang banyak keluarga yg berekonominya kurang mampu. Program ini bertujuan untuk memudahkan keluarga yg berekonomi kurang mampu untuk dapat menunjang Pendidikan PAUD bagi semua anak. Implementasi program SPP gratis di TK Ar-Raudhah, sejak sekolah tersebut pertama kali dibuka, memberikan konteks yang menarik untuk di analisis. Maka dari itu Penelitian ini akan menelaah faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi program tersebut. Penelitian ini juga menganjurkan penerapan model ini di Lembaga Pendidikan lainnya.

METODE

Penelitian ini dilakukan di TK Ar-Raudhah yang berlokasi di Gampong Pusong baru Kecamatan Banda sakti kota Lhokseumawe. Populasi penelitian ini adalah kepala sekolah TK Ar-Raudhah dan beberapa pendidik lain yang mengimplementasikan SPP gratis, seperti guru dan operator sekolah TK Ar-Raudhah. Tak hanya itu penelitian ini juga mewawancarai beberapa orang tua murid yg anaknya terdaftar di TK Ar-Raudhah.

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini melalui beberapa teknik yaitu wawancara dan dokumentasi, wawancara yg dilakukan adalah wawancara secara mendalam dengan kepala sekolah, guru, operasional sekolah yg mengimplementasikan spp gratis di TK Ar-Raudhah dan juga beberapa wali murid/orang tua murid yg anaknya terdaftar di TK Ar-Raudhah. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor implementasi SPP gratis di TK Ar-Raudhah. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif

untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini membahas kajian faktor-faktor implementasi spp gratis di TK Ar-Raudhah, Sebuah Lembaga Pendidikan anak usia dini yang berlokasi di daerah Gampong Pusong baru Kecamatan Banda sakti Kota Lhokseumawe yang dimana sejak berdirinya TK ini TK tersebut sudah mengimplementasikan program SPP gratis kepada seluruh anak, agar seluruh anak dapat merasakan Pendidikan tanpa memandang ekonomi keluarga. Umumnya pada rentang usia lahir sampai 6 tahun anak mengalami masa keemasan (the golden years) yang merupakan masa dimana anak mulai peka/sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis, anak telah siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda, seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual. Masa ini juga merupakan masa peletak dasar pertama untuk mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, gerak-motorik, dan sosio emosional pada anak usia dini. (Montessori dalam Hainstock, 1999:2)

Pada kondisi the golden age ini juga merupakan suatu peluang emas untuk intervensi yang dapat memacu dalam perkembangan kehidupan anak.. Apabila masa itu dilepas begitu saja dari pengawasan orang tua atau para pendidik, maka biasanya akan merugikan anak dalam pertumbuhan selanjutnya, Uce, L. (ca. 2002). Pendidikan anak usia dini ini sangat penting guna dalam hal mengembangkan perkembangan dan membentuk karakter si anak bukan hanya itu Pendidikan anak usia dini juga sangat dibutuhkan oleh anak karna pada masa inilah anak dapat menentukan pilihan Pendidikan selanjutnya yang di inginkan, Maka dari itu anak sangat membutuhkan akses Pendidikan yang berkualitas pada masa usia dini .

Salah satu akses Pendidikan berkualitas yang di maksud adalah prasarana dan sarana. Secara otimologis (arti kata) prasarana berarti alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam Pendidikan misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah, dana kelas , dana guru, dana kepala sekolah ,uks , dan kamar mandi . Sedangkan sarana seperti alat langsung untuk mencapai tujuan Pendidikan misalnya: alat permainan edukatif, media pembelajaran, perabot, dan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Sedangkan menurut keputusan Menteri P dan K No. 079/1975 sarana Pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar yaitu: a) Bangunan dan prabot sekolah, Alat pelajaran yang terdiri dari, pembukuan dan alat-alat peraga dan laboratorium, dan Media Pendidikan yang dapat di kelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil.

Proses selanjutnya yaitu pemeliharaan, Pemeliharaan sarana dan prasarana mempunyai pengaruh besar terhadap program mengajar-belajar. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan menghilangkan atau meniadakan beberapa sarana maupun prasarana yang ada di sekolah karena sudah tidak memiliki nilai guna, D. Martha & D. Suryana (2019). Untuk dari itu sarana dan prasarana harus di pelihara/dijaga dengan cara melakukan kegiatan inventarisasi.

Kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu melakukan pencatatan sarana dan prasarana, membuat kode barang sesuai dengan sarana dan prasarana, melaporkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan bertanggung jawaban atas apa yang dilaporkan tentang keadaan sarana dan prasarana di sekolah, Menurut Barnawi dan Arifin (2012).

Jenis peralatan dan perlengkapan yang di sediakan di sekolah dan cara-cara pengadministrasinya juga mempunyai pengaruh besar terhadap program mengajar-belajar. Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar dan mengajar, demikian pula administrasi yang kurang dan tidak bagus akan mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan tersebut, sekalipun peralatan dan perlengkapan pengajaran itu keadaanya istimewa. Tidak hanya itu administrasi yang tidak bagus dan kurangnya administrasi dapat

mengurangi akses Pendidikan lainnya. Namun, bagi TK Ar-Raudhah kurangnya administarsi bukanlah penghambat dalam mengaseskan Pendidikan yang berkualitas karena di TK Ar-Raudhah administrasinya berasal dari Anggaran Dana Gampong (AGD) dan dari bantuan oprasional pendidikan (BOP) dari pemerintah yang di salurkan ke satuan TK. Maka dari itu TK Ar-Raudhah berhasil mengimplementasikan SPP gratis dari sejak pertama berdirinya TK Ar-Raudhah

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah adanya keterlibatan dana dalam kajian pendidikan, di mana hal ini jelas tidak bisa dihindari mengingat pendidikan merupakan benda ekonomi yang langka, dan dana merupakan salah satu yang perlu dikorbankan untuk mendapaTKannya. Menurut Thomas H. Jones (1985: 3-20) "money come into play in the education enterprise in three areas: (1) Economics of education, (2) school finance, (3) school business administration". Yang artinya "dana ikut berperan dalam usaha pendidikan dalam tiga bidang: (1) Ekonomi pendidikan, (2) kedanaan sekolah, (3) administrasi bisnis sekolah". Dengan demikian ketiga bidang tersebut merupakan kajian tentang pendidikan yang melibaTKan satuan dana. Oleh karena itu, masalah pembiayaan pendidikan pun tidak terlepas dari kajian tentang dana/dana berkaitan dengan perolehannya serta penggunaannya dalam suatu proses pendidikan (sekolah). Karena apapun yang dibutuhkan dalam membangun sebuah Pendidikan itu membutuhkan dana/dana. Namun dalam kehidupan sehari-hari beberapa warga atau masyarakat banya memiliki kendala dalam hal ekonomi kedanaan. Seperti salah satu contoh masyarakat yang berada di sekitar TK Ar-Raudhah yang ada dalam penelitian ini yaitu gampong pusong baru yang berada di kota lhokseumawe kecamatan banda sakti. Gampong pusong baru ini terletak di dekat laut dan kebanyakan penghasilan warga masyarakat pusong baru berasal dari pekerjaan nelayan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah masyarakat gampong pusong baru yaitu 4.200 jiwa dan yang terdata dalam warga miskin atau kurang mampu berjumlah 40% dari data semua penduduk masyarakat gampong pusong baru. dan bagi beberapa warga yang kurang mampu ekonominya sangatlah susah mengeluarkan dana/dana dalam hal Pendidikan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Maka dari itu salah satu solusi bagi warga yang ingin menyekolahkan anak mereka namun keterbatasan ekonomi sekarang TK Ar-Raudhah menemukan jawabannya.

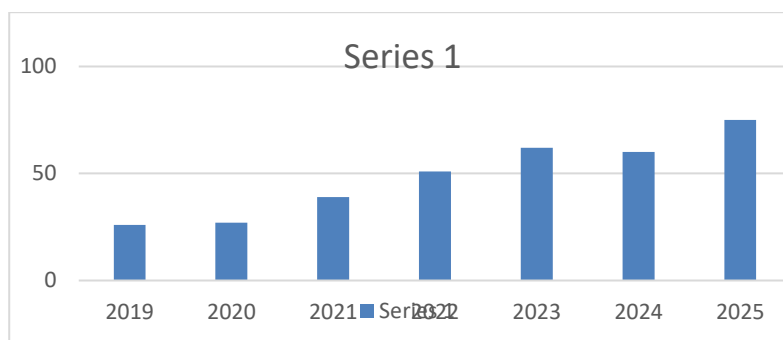
TK Ar-Raudhah sejak pertamanya di buka sudah mengimplementasikan SPP gratis kepada seluruh warga atau masyarakat guna membantu masyarakat yang ekonominya kurang mampu, beberapa masyarakat yang ekonominya kurang mampu membuat anak mereka harus putus sekolah bahkan ada yang sama sekali tidak menyekolahkan anak mereka hanya karna ekonomi yang tidak cukup. Maka dari itu TK Ar-Raudhah sangat berharap dengan adanya implementasi SPP gratis ini semoga semua anak dapat merasakan Pendidikan tanpa adanya memandang status ekonomi. " Ungkap ibu Nur asiah S.pd.i. kepala sekolah TK Ar-Raudhah saat wawancara eksklusif pada juni 2025.

"Beberapa penghasilan orang tua sekitaran gampong pusong baru rata-rata menengah kebawah, kebanyakan orang tuanya nelayan, minimal bisa membantu mengurangi peneluaran bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu"

Dengan salah satu faktor tesebut implementasi SPP gratis di TK Ar-Raudhah sudah di jalankan ketika TK tersebut pertama kali dibuka yaitu pada tahun 2019 hingga sekarang 2025, Berikut data murid TK Ar-Raudhah dari tahun 2019/2025.

Dari gambar 1 menunjukkan hasil data murid TK Ar-Raudhah dari tahun 2019-2025, pada tahun pertama yaitu tahun 2019 jumlah murid TK Ar-Raudhah berjumlah 26 murid, tahun berikutnya 2020 berjumlah 27 murid bertambah banya 1 murid dari tahun sebelumnya, tahun 2021 berjumlah 39 murid, pada tahun 2022 berjumlah 51 murid, pada tahun 2023 berjumlah 62 murid, pada tahun 2024 berjumlah 60 murid berkurang 2 murid dari tahun sebelumnya, dan pada tahun ini 2025 berjumlah 75 murid . Dengan demikian hasil data murid TK Ar-Raudhah menunjukkan bahwa murid di TK Ar-Raudhah meningkat dari tahun ke tahun dan beberapa orang tua medaftarkan kembali anaknya yg selanjutnya karena mereka telah merasakan hasil impementasi yg sudah di lakukan oleh TK Ar-Raudhah. dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa implementasi SPP gratis yang dilakukan di TK Ar-Raudhah dapat menarik minat orang tua karena adanya implmentasi tersebut.



Gambar 1. Data Murid TK Ar-Raudhah dari tahun 2019/2025

Dilihat dari beberapa hasil penelitian hasil implementasi TK lain berbeda, Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan pendidikan gratis. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ida Mustikawati (2019) dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan gratis di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ibad Ajung di kota Jember. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada sekolah tersebut masih mengalami kendala yakni, adanya keterlambatan pencairan dana ke sekolah dan kurangnya pemahaman orang tua siswa yang beranggapan bahwa kebijakan gratis tersebut ditanggguh seluruhnya oleh pemerintah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Karamoy dkk (2018) yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan gratis 9 tahun di kecamatan Domuga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sudah terimplementasi dengan baik karena didukung dengan adanya interaksi yang baik antar organisasi pelaksana, masing-masing instansi (Dinas Pendidikan, sekolah dan komite sekolah) telah menjalankan tugas sesuai fungsinya dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang mendukung kebijakan tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Citra (2017) dengan tujuan untuk melihat bagaimana implementasi program pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar di kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut belum terimplementasi dengan baik. Kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran dalam APBD sehingga masih banyak biaya yang harus dikeluarkan orang tua untuk sekolah. Kendala lainnya adalah program ini hanya sebatas kebijakan politis kepala daerah. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dkk (2017).

Keempat, hasil penelitian dari M. Irsyad fadoli (2021) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa. dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis secara umum belum terlaksana dengan baik. Kendala yang dialami adalah kurangnya anggaran, komunikasi yang belum terjalin dengan baik, SOP yang kurang jelas dan keterlambatan pencairan dana. Adapun salah satu contoh kebijakan yang berjalan dengan baik dari penelitian-penelitian di atas didorong oleh faktor koordinasi antar organisasi pelaksana dan lingkungan eksternal.

Dari hasil keempat penelitian di atas menunjukan bahwa ada beberapa sekolah yang mengimplementasikan sekolah gratis namun tidak dapat terlaksanakan dengan baik karena beberapa faktor kendala mengenai anggaran, Namun di TK Ar-Raudhah berhasil mengimplementasikan sejak pertama kali dibukanya TK tersebut salah satu faktornya yaitu karena anggaran yang di dapatkan oleh TK Ar-Raudhah berasal dari dana desa atau dari Anggaran Dana Gampong (ADG) dan juga di dapatkan dari Bantuan oprasional Pendidikan (BOP).

Anggaran Dana Gampong (ADG) untuk taman Kanak-kanak (TK) di aceh , khususnya di lhokseumawe, merujuk pada alokasi dana desa yang dialokasikan khusus untuk mendukung program dan kegiatan TK di tingkat gampong (desa). Anggaran Dana Gampong ini merupakan

bagian dari Dana Desa yang diterima oleh pemerintah gampong, dan penggunaannya diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini di wilayah tersebut. Sumber dana Anggaran Dana Gampong berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota kepada masing-masing gampong. Undang-undang tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Pemenuhan hak atas pendidikan pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari Negara untuk memberikan jaminan kepada warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (UUD 1945).

Mengenai tanggung jawab Negara terhadap akses pendidikan bagi setiap warga Negara, kembali ditegaskan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan nasional adalah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003. Besaran alokasi Anggaran Dana Gampong yang diterima dari negara untuk TK bervariasi tergantung pada kebijakan daerah dan kebutuhan masing-masing gampong. Manfaat Anggaran Dana Gampong untuk TK sangat signifikan. Pertama, Anggaran Dana Gampong dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini, terutama di daerah terpencil atau kurang mampu.

Dengan adanya dana ini, gampong dapat membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana TK, seperti gedung sekolah, dana kelas, dan fasilitas bermain. Kedua, Anggaran Dana Gampong dapat meningkatkan kualitas pendidikan TK melalui penyediaan alat peraga pendidikan, pelatihan bagi guru TK, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Ketiga, Anggaran Dana Gampong dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan TK, sehingga tercipta sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penggunaan Anggaran Dana Gampong untuk TK membutuhkan perencanaan yang matang dan partisipatif. Pemerintah gampong perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pengelola TK, tokoh masyarakat, dan orang tua murid, dalam proses perencanaan dan penganggaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana gampong juga sangat penting untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Pemantauan dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk mengukur dampak penggunaan Anggaran Dana Gampong terhadap peningkatan akses dan kualitas TK. Dengan demikian, Anggaran Dana Gampong dapat membantu mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas di Indonesia, terlebih-lebih bagi masyarakat yang ekonominya kurang mampu.

Sedangkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam konteks Taman kanak-kanak (TK) merupakan program pendanaan pemerintah yang bertujuan untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. BOP TK bukan merupakan dana untuk gaji guru atau pembangunan fisik, melainkan ditujukan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional non-personalia yang menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Program ini dirancang untuk meringankan beban biaya operasional TK, baik negeri maupun swasta, sehingga satuan pendidikan dapat lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan layanan bagi anak didik.

Manfaat BOP TK sangatlah beragam. Secara langsung, BOP membantu pembiayaan pengadaan alat peraga pendidikan, seperti buku, mainan edukatif, dan media pembelajaran lainnya. Dana ini juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembelajaran yang

bersifat ekstrakurikuler, seperti kunjungan lapangan, kegiatan seni dan budaya, serta kegiatan pengembangan lainnya yang mendukung perkembangan holistik anak. Selain itu, BOP dapat digunakan untuk perawatan sarana dan prasarana sekolah, seperti perbaikan gedung, pemeliharaan kebersihan, dan pengadaan perlengkapan sekolah. Dengan demikian, BOP berkontribusi pada terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif bagi anak.

Sumber dana BOP TK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk program BOP PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), yang mencakup TK, setiap tahunnya. Alokasi dana tersebut disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau instansi terkait lainnya kepada satuan TK yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Besaran dana yang diterima setiap TK bervariasi tergantung pada beberapa faktor, antara lain jumlah siswa, lokasi geografis, dan jenis TK (negeri atau swasta). Di TK Ar-Raudhah persiswanya menerima dana sebesar Rp.315.000 per anak dalam setahun sekali, Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOP TK sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor pengimplementasian SPP gratis di TK Ar-Raudhah yaitu dimulai dari faktor ekonomi masyarakat sekitar TK Ar-Raudhah yaitu di gampong pusong baru, dan anggaran dana yang didapatakan dari Anggaran Dana Gampong (ADG) dan juga dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Itulah beberapa faktor implementasi SPP gratis di TK Ar-Raudhah. Ungkap Ibu Nur Asiah S.Pd.I. Kepala sekolah TK Ar-Raudhah, dalam wawancara eksklusif pada Mei 2025. “

“Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, program SPP gratis tetap menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan pemerataan akses Pendidikan, Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, tantangan tersebut dapat di atasi”.

Meskipun program ini telah berhasil memberikan pembebasan SPP, perlu diperhatikan bahwa cakupan program ini masih terbatas. Program ini hanya mencakup pembebasan SPP, sementara biaya lain seperti seragam sekolah, majalah sekolah, dan perlengkapan sekolah lainnya masih menjadi tanggung jawab orang tua. Namun, terdapat kebijakan khusus untuk anak yatim yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dengan domisili Gampong Pusong Baru. Anak-anak yatim ini mendapatkan pembebasan biaya secara menyeluruh, termasuk seragam, majalah, dan perlengkapan sekolah lainnya. Kebijakan ini menunjukkan komitmen untuk memberikan dukungan lebih kepada kelompok masyarakat yang rentan.

Perlu ditekankan bahwa kebijakan ini hanya berlaku bagi anak yatim yang berdomisili di Gampong Pusong Baru. Anak yatim yang KK-nya tidak berdomisili di Gampong Pusong Baru hanya mendapatkan pembebasan SPP, sementara biaya lain tetap menjadi tanggung jawab mereka. Perbedaan perlakuan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan keadilan dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak yatim, terlepas dari domisili mereka. Mungkin perlu dipertimbangkan perluasan cakupan program agar lebih inklusif dan merata.

Keberhasilan program SPP gratis di TK Ar-Raudhah tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi dan pendanaan, tetapi juga pada komitmen semua pihak yang terlibat, termasuk pihak sekolah, pemerintah gampong, orang tua murid, dan masyarakat sekitar. Evaluasi berkala dan adaptasi terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat sangat penting untuk memastikan program ini tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya. Dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan, program ini diharapkan dapat menjadi model bagi program serupa di daerah lain dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Lhokseumawe.

KESIMPULAN

Keberhasilan program ini, yang telah berjalan sejak 2019, terkait erat dengan tiga faktor utama: (1) kondisi sosio-ekonomi masyarakat Gampong Pusong Baru, di mana sebagian besar penduduknya berprofesi nelayan dengan pendapatan menengah ke bawah,

sehingga program ini sangat dibutuhkan untuk menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu; (2) adanya dukungan pendanaan yang signifikan dari Anggaran Dana Gampong (ADG) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yang memungkinkan TK Ar-Raudhah untuk memberikan pendidikan gratis tanpa membebani orang tua siswa; dan (3) komitmen penuh dari pihak sekolah, pemerintah gampong, dan masyarakat dalam menjalankan program ini. Meskipun program ini telah berhasil meningkatkan akses pendidikan, penelitian menyoroti perlunya perluasan cakupan bantuan, khususnya untuk anak yatim di luar Gampong Pusong Baru, dan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program dalam jangka panjang. Studi ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan inklusif dan berkelanjutan di daerah dengan kondisi ekonomi yang beragam. Keberhasilan TK Ar-Raudhah dapat menjadi model bagi lembaga pendidikan lain dalam upaya meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. *JPSI. Journal of Public Sector Innovation*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p1-9>
- Barnawi, & Arifin. (2012). *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Ar-Ruzz Media.
- Citra, D. E. (2017). Implementasi Program Pendidikan Gratis pada Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Bengkulu. *Jurnal Manhaj*, 5(2). <https://doi.org/10.1161/.v5i2.749>
- D. Martha & D. Suryana. (2019). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Inklusif Anak Usia Dini*.
- Hadisi, L. (2015). Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*.
- Hainstock, E. G. (1999). *Metode pengajaran Montessori untuk anak prasekolah*. Pustaka Delapresta.
- Jones, T. H. (2017). *Financial Management for Educational Institutions*. Prentice Hall.
- Karamoy, T. T., Rorong, A. J., & Kolondam, H. F. (2018). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis 9 Tahun di Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi publik Universitas Sam Ratulangi Manado*, 5(66).
- M. Irsyad F, Teguh Y, & Tri Y. (2017). Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 5(1), 2021.
- Menteri P dan K No. 079/1975 sarana Pendidikan. (1975).
- Mustikawati, I. (2019). Analisis Implementasi Program Pendidikan Gratis di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ibad Ajung Jember. *Jurnal Majalah Ilmiah DIAN ILMU*, 19(1). <https://doi.org/10.37849/midi.v19i1.165>
- Pedana, N. S. (2015). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan untuk anak-anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 21(3), 279-298. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v21i3.191>
- Rahman, H. S. (2005). *Pendidikan anak usia dini*. Galah.
- Ruhyana, N. F. (2018). Aksesibilitas Anak Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan Dikmas*.
- Sari, A. P., Mualif, A., & Mailani, I. (2023). Hubungan status sosial ekonomi orang tua dengan motivasi belajar siswa. *Jom ftk uniks*, 3(2), 325.
- Uce, L. (ca. 2002). *The Golden Age: Masa Efektif Merancang Kualitas Anak*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Ar-Raniry.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11. (2003).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 53 ayat (1). (2002).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) dan (4). (1945).